

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai semboyan resmi pertahanan Indonesia, "Bela Negara" merupakan konsep sentral identitas nasional Indonesia. Pelaksanaan konsep Bela Negara diwujudkan dalam sebuah program pemerintah Republik Indonesia yaitu Komponen Cadangan. Terbentuknya Komponen Cadangan menjawab tantangan terkait dengan fungsi negara dalam menjalankan pertahanan nasional sesuai yang dicita – citakan para pendiri bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara mengkodifikasi pengertian Bela Negara yang termasuk Komponen Cadangan sebagai salah satu jenis pertahanan negara. UU ini mengatur berbagai kendali akan terlaksananya program Komcad dari proses pembentukan, pengangkatan dan penetapan, masa pengabdian sampai pemberhentian. Komcad juga mendapatkan pembinaan, pemeliharaan dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pertahanan negara. Untuk menjalankan seluruh peraturan dasar mengenai Komcad tersebut, pemerintah membuat peraturan pelaksana sebagai teknis pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Pemerintah dan beberapa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan Komponen Cadangan ialah menjaga pertahanan negara dan terlibat dalam keadaan darurat perang yang dapat terjadi sewaktu - waktu dengan melakukan mobilisasi oleh Komponen Cadangan beserta seluruh komponen Utama sampai Kembali dilakukan demobilisasi. Program Komcad telah berjalan dan menjadi sejarah baru kemajuan konsep pertahanan negara dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam melindungi segenap bangsa. Program ini harus terus dievaluasi dari segi konsep, teknis di lapangan, serta anggaran yang digunakan agar dapat efektif dan mendukung pertahanan bangsa dan negara.

B. Saran

Program Komponen Cadangan sebagai wujud pelaksanaan konsep Bela Negara masih terdapat beberapa kekurangan. Penulis membuat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai data untuk evaluasi program potensial di masa mendatang:

- 1) Pemerintah perlu melakukan evaluasi dari segi regulasi di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 serta peraturan – peraturann pelaksana dibawahnya untuk melihat keefektifan sebuah undang – undang dalam pelaksanaannya di lapangan.
- 2) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia perlu melakukan komando yang jelas terhadap para personiil setelah dilakukan pengajaran dan pembelajaran. Penyelesaian Pelatihan Formal untuk Komponen Cadangan dan pelatihan diberi tugas dalam sektor - sektor pemerintahan dan dalam kegiatan - kegiatan masyarakat.
- 3) Data – data terkait dengan program Komponen Cadangan, yang meliputi jumlah warga negara yang terlibat, lolos, dan siap menjadi anggota Komcad, publikasi di media – media, serta anggaran yang telah dan ingin digunakan uuntuk program kedepannya perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai laporan dan kontrol sosial.Hal ini disampaikan karena penulis ingin lebih mengetahui secara spesifik hal – hal yang ada di dalam program ini, namun belum maksimal diberikan atau disampaikan melalui media dan website resmi kementerian.